

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia pernah mengalami krisis keuangan hebat pada tahun 1997 yang telah merusak tatanan dan sendi-sendi perekonomian Indonesia khususnya dunia perbankan. Hal ini mengakibatkan terjadi krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional.

Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda Karena tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian serta perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, karena seperti kita ketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Financial*) dengan mereka yang memiliki kekurangan dana (*Deficit Financial*), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya.

Kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang, likuiditas dan lain sebagainya. Kinerja suatu bank dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan laporan itu dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Analisis rasio

keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai kinerja bank.

*Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan. *Return On Asset (ROA)* dipilih karena dapat menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi tingkat *Return On Asset (ROA)* maka akan semakin baik keadaan sebuah perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah *Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*Disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *Good Corporate Governance (GCG)* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Alina Addiyah, 2014).

*Good Corporate Governance* merupakan salah satu komponen non keuangan yang sekarang ini menjadi isu penting dan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan laba dan kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*). *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan juga sebagai suatu pengendalian internal perusahaan guna mengelola resiko yang signifikan dengan mendorong terbentuknya manajemen perusahaan yang bersih dan transparan. Tujuan utama diterapnya *Good Corporate Governance* (GCG) adalah untuk melindungi *Stakeholder* dari perilaku manajemen tidak bersih dan tidak transparan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dinilai dapat memperbaiki citra perbankan. Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong peningkatan kinerja perbankan itu sendiri.

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki beberapa indikator yang berupa komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan latar belakang pendidikan komisaris. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji keterkaitan antara mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Disetiap struktur organisasi perusahaan, biasanya harus ada unit yang dinamakan dewan komisaris yang bertugas mengawasi kinerja para anggota direksi (direktur) perusahaan, agar setiap direksi berkinerja sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, para direktur mengawasi para manajer yang menjadi bawahannya. Seterusnya, para manajer

mengawasi kepala seksi yang bertugas pula mengawasi para karyawan yang secara operasional melaksanakan kerja fisiknya. Setiap penyimpangan yang dilakukan karyawan harus dikoreksi oleh atasan langsungnya, yaitu kepala seksi. Selama masih bisa ditanggulangi dalam arti diperbaiki, tidak perlu ditangani oleh kepala bagian (manajer) sebagai atasan. Akan tetapi, apabila masalahnya tidak bisa ditanggulangi pada tingkat bawah maka masalah harus diselesaikan ditingkat menengah bahkan tingkat atas. Misalnya, masalah yang berkaitan dengan uang (harga, diskon). Umumnya diserahkan keatas untuk penyelesaiannya. Pernah di Indonesiapun mengalami demam *Governance*,dimana setiap pejabat bicara soal *Governance*. Bagus, tapi sayangnya hal tersebut tampaknya tidak serius diterapkan dan hasilnya, antara lain bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di merger, karena merger adalah salah satu alat untuk menyelamatkan perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lainnya. Artinya, demam *Governance* tidak meningkatkan kinerja perusahaan atau pemerintah.

Indikator lain dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dewan komisaris. Dewan komisaris adalah dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), keputusan yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi

nasihat kepada direksi secara objektif. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak menjalankan fungsinya dengan baik yang diakibatkan masih adanya hubungan afiliasi antar dewan komisaris sehingga kinerja dewan komisaris menjadi tidak independen.

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan bank. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggungjawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perbankan. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Salah satu bentuk usaha yang ada di Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (UU No. 10/1998). Bank sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat. Karena bank dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena bank membantu kemudahan mendapatkan modal sehingga masyarakat bisa menghasilkan karya dan produk - produk dalam negeri yang tidak kalah saing dengan produk dari luar negeri.

Salah satu perbankan yang ada di Indonesia adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk. PT. Bank Negara Indonesia Tbk merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang mampu bertahan dalam persaingan ekonomi saat ini.

Selain mampu bertahan dan menjadi kepercayaan masyarakat bank ini juga adalah salah satu bank yang sudah *Go Public*. Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 oleh Margono Djojohadikusumo. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama milik Negara yang lahirnya setelah kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul penelitian yaitu “ **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk Pada Periode 2012-2015** ”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk pada periode 2012-2015 ?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk pada periode 2012-2015 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk pada periode 2012-2015.
2. Untuk melihat Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk pada periode 2012-2015 .

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini antara lain :

##### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta pemahaman mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

##### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *Corporate Governance* terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan, dan khususnya bagi industri perbankan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

##### 3. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan.

#### **1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas**

##### **1.5.1. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan terdapat banyak hal yang menjadi indikator dari *Good Corporate Governance* (GCG) berupa komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan latar

belakang pendidikan komisaris. Pada penelitian ini hanya terfokus pada pengaruh dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan. Dimana kinerja keuangan diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio yang membandingkan antara laba bersih dengan total aktiva.

### **1.5.2. Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astri Aprianingsih dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) tahun pengamatan pada penelitian terdahulu adalah 2011-2014 sedangkan pada

penelitian ini tahun penelitiannya adalah 2012-2015.(2) objek penelitian terdahulu adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini adalah pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori-teori atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang relevan serta membahas kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Isi pada bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan uraian mengenai hasil dari pengolahan data yang diambil dan dianalisis.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Bank**

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (UU No. 10/1998).

Defenisi bank menurut hasibuan dalam wati (2015) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*Financial Asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Sedangkan dalam PSAK No.31 Tahun 2015 bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi tabungan, deposito, dan giro.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam berbagai bentuk kredit (pinjaman).
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya.

## 2.2. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2012: 2), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.

Menurut Jumingan (2009: 239), kinerja (*Performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank.

Jadi, dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya.

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*Return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran tentang aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran tentang aktivitas manajemen (Kasmir, 2008: 211).

Rumus untuk mencari *Return On Assets* (ROA) dapat digunakan sebagai berikut (Harahap, 2007: 305).

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Semakin rendah (kecil) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2008: 202). Artinya bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

### **2.3. Agency Theory (Teori Keagenan)**

Teori agency (*Agency Theory*) merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *Corporate Governance*. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen Jensen dan Meckling dalam Lestari (2011). Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsipal akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan return dari uang yang mereka investasikan. Di lain pihak, agen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginan prinsipal. Sebagai wujud dari akuntabilitas manajemen kepada pemilik, setiap periode manajemen memberikan laporan mengenai informasi perusahaan kepada pemiliknya.

Menurut Harmono (2009) teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik dengan agen, dalam hal ini manajemen yang dipercaya oleh pemilik untuk

mengelola dana digunakan untuk investasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pemaksimalan kekayaan pemilik.

Ngui *et al* dalam Syafiqurrahman, Andiarsyah dan Suciningsih (2014), menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan adalah dengan menerapkan *Corporate Governance*. *Corporate Governance* adalah salah satu cara pemegang saham untuk melindungi kepentingannya. Pengawasan manajemen penting dilakukan agar kebijakan manajemen tetap dapat melindungi kepentingan pemegang saham. Salah satu mekanisme *Corporate Governance* adalah komite audit dan keberadaan dewan komisaris. Dengan komite audit dan dewan komisaris terutama komisaris independen, diharapkan ada pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan keberadaan *Corporate Governance* tersebut, diharapkan manajemen akan dapat bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

#### **2.4. *Good Corporate Governance* (GCG)**

Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *Legal And Political Framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009;18).

Menurut Horne dan Wachowicz (2005), tata kelola perusahaan adalah sistem yang mensyaratkan perusahaan dikelola dan dikendalikan. Sistem ini melintasi berbagai hubungan yang ada antara para pemegang saham, dewan direksi, serta pihak manajemen senior.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu seperangkat sistem atau tata kelola perusahaan yang mengatur perusahaan agar mampu mendorong terciptanya kinerja manajemen untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Jadi, baik “*Corporate Governance*” atau “*Public Governance*” adalah tahap terakhir dalam rangka mengawasi dan menjaga pelaksanaan dari rencana strategik yang telah dibuat sebelumnya (Prawirosentono dan Primasari, 2014).

## **2.5. Manfaat Dan Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Menurut *Forum For Corporate Governance In Indonesian* (FCGI) dalam Yuniarti (2014), pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *Stakeholder*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.

- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholders Value* dan dividen.

Sedangkan tujuan *Corporate Governance* menurut Hardikasari (2011) adalah sebagai berikut :

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *Stakeholder* non pemegang saham.
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board Of Directors* dan manajemen perusahaan.
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *Board Of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

## **2.6. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

Secara umum dalam Yuniarti (2014) terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yaitu:

- 1) *Transparency* (keterbukaan informasi)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

## 2) *Accountability* (akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

## 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

## 4) *Independency* (kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

## 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

## **2.7. Indikator *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Penelitian**

Dari berbagai unsur *Corporate Governance* yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan terfokus pada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

### a. Dewan Komisaris

Disetiap struktur organisasi perusahaan, biasanya harus ada unit yang dinamakan dewan komisaris yang bertugas mengawasi kinerja para anggota

direksi (direktur) perusahaan, agar setiap direksi berkinerja sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan sebelumnya. (Prawirosentono dan Primasari; 2014)

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi (Aprianingsih; 2016).

Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan kinerja bank. Menurut Chtourou dalam lestari (2011) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dalam komposisi ukuran dewan komisaris didalamnya terdapat komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

#### b. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan bank. Dewan Direksi berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi merupakan perwakilan para

pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan. Dewan Direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar perbankan. Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana (Aprianingsih; 2016)

## **2.8. Penelitian Yang Relevan**

1. Astri Aprianingsih (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”. Hasil penelitian ini menunjukkan Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit,

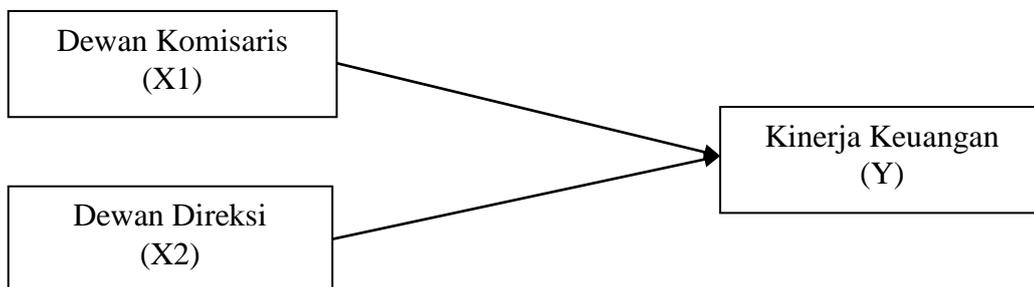
Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.

2. Eko Sunarwan (2015) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013)”. hasil penelitian menunjukkan bahwa variable independen Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assset* (ROA). Sedangkan variable independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assset* (ROA).
3. Cintia Yunarti (2014) dengan judul “pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan *High Profile* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013”. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 1,324, dan nilai perusahaan 1,122; 2) ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 2,317, dan nilai perusahaan 5,054; 3) kuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar -1,268, dan nilai perusahaan -1,539; 4) kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 2,719, dan nilai perusahaan 2,646; 5) kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

(ROA) dengan t hitung sebesar 2,734, dan nilai perusahaan 2,544; 6) kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 0,648, dan nilai perusahaan 0,440; 7) kepemilikan Publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 3,414, dan nilai perusahaan 2,020; 8) kepemilikan Asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 2,679, dan nilai perusahaan 2,594.

## 2.9. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :



**Gambar 2.9**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.10. Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.
- H2 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan.
- H3 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk dengan menganalisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan rasio analisis keuangan pada periode 2012–2015 dan menggunakan analisis statistik untuk melihat pengaruh antara setiap variabel.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini peneliti menganalisis nilai PT. Bank Negara Indonesia Tbk dengan menggunakan rasio keuangan untuk setiap variabelnya untuk melihat kinerja keuangan selama periode 2012-2015 dan dianalisis secara statistik regresi berganda untuk melihat pengaruh dari variabel yang diteliti.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang sudah diolah dan di dokumentasikan oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk yaitu berupa Laporan Keuangan lengkap pada periode 2012–2015 untuk kemudian dianalisis menggunakan rasio

keuangan. Sumber data penelitian ini adalah sumber sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya saja lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012), dan pada penelitian ini peneliti mendapatkannya melalui peranan pihak ketiga yaitu website resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengunduh laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia Tbk dari Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.5. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional**

Variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2012).

#### **3.5.1. Variabel Independen**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, dan dewan direksi.

##### **1. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris adalah dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, keputusan yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap

manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan.

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan, Berikut rumus Ukuran Dewan Komisaris:

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris = \Sigma\ anggota\ dewan\ komisaris$$

## 2. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan bank. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggungjawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perbankan. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam perusahaan, Berikut rumus Ukuran Dewan Direksi:

$$Ukuran\ Dewan\ Direksi = \Sigma\ anggota\ dewan\ Direksi$$

### 3.5.2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan. *Return On Asset* (ROA) dipilih karena dapat

menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi tingkat *Return On Asset* (ROA) maka akan semakin baik keadaan sebuah perusahaan.

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Hasan (2006) teknik analisis data adalah memperkirakan atau menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari beberapa-beberapa variable terhadap variable lainnya.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah :

Analisis dengan menggunakan teknik statistik dimana peneliti menggunakan rasio keuangan yang berhubungan dengan setiap variabel untuk melihat nilai dari setiap variabel untuk bisa mengevaluasi hasilnya sebagai berikut:

#### **3.6.1. Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Formulasi persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Kinerja Keuangan

a = Bilangan Konstanta

X<sub>1</sub> = Dewan Komisaris

$X_2$  = Dewan Direksi

$b_1$  &  $b_2$  = Parameter yang diestimasi untuk  $X_1$  &  $X_2$

### 3.6.2. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah persamaan dalam statistik yang digunakan untuk mengetahui ketepatan hubungan satu variabel atau lebih terhadap variabel dependennya dalam satu persamaan linier berganda. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau ( $R^2$ ).

### 3.6.3. Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji F)

Menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara  $F$ -tabel dengan  $F$ -hitung.

Untuk menghitung nilai  $F$ -tabel, tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df=(n-m-1)$  dimana  $n$  adalah jumlah observasi,  $m$  adalah jumlah variabel bebas.

Dasar keputusan uji :

Apabila  $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Apabila  $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

### 3.6.4. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji hipotesis dengan  $t$ -hitung digunakan untuk menguji koefisien regresi variabel independen.

Untuk menentukan nilai  $t$ -tabel ditentukan taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan  $df=(n-2)$  dimana  $n$  adalah jumlah observasi.

Dasar keputusan uji :

$H_0$  diterima bila  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$

$H_0$  ditolak bila  $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$